

BAB II

Tinjauan pustaka

2.1. Literatur Review

Untuk menyusun karya ilmiah, perlu mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, literatur review dilakukan untuk menguraikan yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun kerangka penelitian, memformulasikan permasalahan, dan mengklarifikasi. Sumber literatur yang dipakai mencakup jurnal ilmiah, sumber online, berita resmi, skripsi, dan laporan hasil penelitian.

Terdapat tiga alasan mengapa pengembangan wisata di suatu daerah penting, baik secara lokal, regional, maupun nasional yaitu: 1) berkaitan dengan kepentingan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta membangun infrastruktur; 2) berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan objek wisata; 3) pariwisata dapat membuka wawasan masyarakat setempat, mengurangi kesalahpahaman, dan membantu mereka memahami budaya dan kebiasaan orang lain yang datang berkunjung ke daerah mereka (Yoeti, 1997). Beberapa referensi literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini meliputi:

- Menurut Asso et al., 2019 dalam risetnya dengan judul “Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Singapura dalam Pengembangan Pariwisata”, diungkapkan bahwa awal mula kerjasama antara Indonesia dan Singapura terjalin sejalan zaman kerajaan kuno pada abad ke-17, di mana wilayah selat sekitar Singapura merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Sriwijaya.

Pada abad ke-14, Singapura berada dalam persaingan antara kerajaan Siam atau yang sekarang dikenal sebagai Thailand dan kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa. Sejarah Melayu mencatat bahwa Singapura kalah dalam satu serangan yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit dalam upaya mengendalikan wilayah Semenanjung Melayu. Parameswara sempat memerintah pulau tersebut selama beberapa tahun sebelum dipaksa untuk pindah ke Malaka dan mendirikan kesultanan Malaka.

- Menurut Rahmi, 2017, pada penelitiannya yang berjudul “Politik Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bintan Tahun 2013-2015”, menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata di Lagoi, memiliki perjanjian yang ditandatangani oleh pejabat dari kedua negara pada tanggal 28 Agustus 1990 di Batam, dan disaksikan oleh kepala negara masing-masing. Perjanjian ini meliputi pembangunan pariwisata di Lagoi, kawasan industri Lobam, kawasan maritim Karimun, serta pengelolaan sumber air Bintan. Proses pengembangan tersebut dimulai pada tahun 1991 dan berlangsung hingga 2004. Pada 18 Juli 1996, perjanjian ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto dan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong sebagai bagian dari kerjasama Indonesia-Singapura dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tentang ekonomi regional. Menurut penelitian, sekitar setengah dari PAD Bintan berasal dari sektor wisata. Pendapatan ini didapat dari

pembayaran pajak dan retribusi restoran serta hotel di kawasan pariwisata bersekala internasional di Lagoi. Meskipun sektor pariwisata lainnya juga memberikan kontribusi, namun tidak sebesar Lagoi. Pada periode tahun 2013-2015, Lagoi diperkirakan memberikan lebih dari 50% sumbangan PAD Bintan.

- Menurut Marina, 2012 dengan penelitiannya yang berjudul “Ekonomi Politik Pariwisata Kawasan Wisata Lagoi Kabupaten Bintan”, dijelaskan bahwa kawasan wisata Lagoi merupakan faktor ekonomi politik penting di Kabupaten Bintan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sangat berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan politik di daerah tersebut. Sejak awal didirikan hingga saat ini, kawasan Lagoi telah menggunakan mata uang dolar (dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat) sebagai alat transaksi. Oleh karena itu, kawasan wisata Lagoi menjadi faktor ekonomi dan politik penting di Kabupaten Bintan yang berpengaruh besar terhadap pembangunan sosial dan politik di daerah tersebut. Meskipun penggunaan mata uang asing sebenarnya menguntungkan bagi pengusaha, namun juga memberikan keuntungan bagi pemerintah Kabupaten Bintan melalui pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan dalam mata uang rupiah sementara pengusaha menggunakan dolar sebagai alat tukar. Uang di kawasan Lagoi menjadi faktor ekonomi politik karena uang bukan hanya alat transaksi keuangan, tetapi juga memiliki pengaruh dalam hal ekonomi politik. Kebijakan

penggunaan mata uang rupiah tidak dapat terlaksana dengan baik jika kondisi lingkungan usaha tidak mendukung.

Pariwisata menjadi sektor yang sangat berpotensi dalam kerjasama sehingga dapat meningkatkan hubungan yang baik antar negara dan meningkatkan perekonomian suatu negara melalui daerah-daerah yang berpotensi memiliki peluang dalam potensi pengembangan pariwisata. Bintan menjadi salah satu daerah yang sangat ketergantungan dari sektor pariwisata sehingga pemerintah daerah sangat berusaha dalam meningkatkan sektor pariwisata.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang penulis ingin sampaikan adalah membahas kerjasama pariwisata Lagoi dalam pengembangan pariwisata Lagoi di Bintan dan dikembangkan oleh perusahaan asal singapura yaitu PT. BRC yang memegang kendali pembangunan pariwisata Lagoi serta dampak pengembangan pariwisata Lagoi terhadap Kabupaten Bintan.

2.2. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teori kerjasama bilateral, kepentingan nasional, dan teori pariwisata.

2.2.1. Kerjasama Bilateral

Kerjasama merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari solusi suatu permasalahan dan untuk memperoleh keuntungan. Dalam ruang lingkup internasional, kemajuan dan perkembangan suatu negara tidak

terlepas dari dukungan atau bantuan dari negara lain. Telah menjadi prinsip dalam bermasyarakat bahwa sebuah negara tidak dapat bertahan sendiri dan memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari negara lain. Proses perkembangan dalam hubungan internasional mulai menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dimana negara-negara mulai sadar akan kebutuhan internal negaranya sehingga memerlukan bantuan dari negara-negara yang memiliki kelebihan dari segala aspek yang negara tersebut butuhkan sehingga muncul suatu ide agar kepentingan yang mereka butuhkan bisa tercapai maka terbentuklah saling ketergantungan antara negara-negara didunia ini yang disebut kerjasama internasional.

Dikutip dari Holsti, 1983, kerjasama dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Kesetaraan nilai atau tujuan antara beberapa pihak dapat menghasilkan sesuatu yang dipromosikan atau dipenuhi secara bersama-sama
- b. Negara tersebut berkeyakinan atau berharap bahwa kebijakan yang diambil oleh negara lain akan mendukung tercapainya kepentingan dan nilai-nilainya
- c. Terdapat perjanjian atau isu yang melibatkan minimal dua negara untuk memanfaatkan kesamaan atau konflik kepentingan

- d. Terdapat aturan, baik yang resmi maupun tidak resmi, yang mengatur transaksi di masa depan guna menjalankan perjanjian
- e. Transaksi antar negara dilaksanakan untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat

Kerjasama antar negara bisa terwujud karena dalam kehidupan internasional mencakup berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Karena perbedaan kepentingan yang beragam, berbagai masalah sosialpun muncul. Agar dapat memenuhi solusi atas masalah-masalah tersebut, beberapa negara membentuk kerjasama internasional.

Kerjasama internasional merupakan suatu bentuk kerjasama antar negara yang dilakukan dengan sukarela tanpa adanya ancaman atau tekanan. Kesepakatan tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak yang terlibat sebagai bukti kesepakatan guna mencegah terjadinya ketidaksepahaman yang dapat memicu konflik. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mencapai keuntungan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

Kerjasama internasional terdiri dari tiga komponen, diantaranya yaitu (Era Riana, 2016):

- 1) Perjanjian bilateral, yang melibatkan dua negara dan dianggap sebagai *treaty contract*

- 2) Perjanjian regional, yang melibatkan beberapa negara di dalam suatu wilayah dan dianggap sebagai *treaty contract* atau *law-making treaty* yang terbatas
- 3) Perjanjian multilateral, yang melibatkan negara-negara tanpa dibatasi oleh wilayah tertentu, dianggap sebagai *law-making treaty international*.

Berdasarkan keterangan di atas, fokus penelitian dilakukan oleh peneliti pada kerjasama bilateral Berdasarkan konsep yang dikutip dari Holsti, 1983, tentang kerangka pemahaman, kolaborasi antar negara terjadi ketika ada beberapa kasus yang memerlukan solusi dan pemerintahan masing-masing negara terlibat dalam pembicaraan untuk menyelesaikannya. Selama pembicaraan tersebut, pihak-pihak terkait menyajikan bukti-bukti teknis yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan atau menandatangani perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak.

Situasi hubungan bilateral adalah deskripsi dari hubungan saling ketergantungan antara dua belah pihak yang terlibat, dan pemerintah merupakan aktor utama dalam pelaksanaannya. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023). Dalam hubungan internasional, hubungan bilateral terdapat dalam dua konteks yang berbeda, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks ini dapat berubah seiring waktu sejalan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri.

Terdapat pola interaksi khusus dalam hubungan bilateral yang melibatkan bentuk kerjasama bilateral. Dalam konteks kerjasama tersebut, hubungan bilateral ditentukan oleh tiga motif utama (Perwita & Yadi, 2005):

1. *Protecting national interests*
2. *Maintaining peace*
3. *Enhancing economic welfare*

(Kruse & Kaya, 2013) mengungkapkan bahwa kerjasama bilateral juga dapat diartikan sebagai kerjasama diplomatik yang dimulai dengan suatu ikatan yang erat antara lembaga-lembaga antar negara. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura terjalin karena keduanya memiliki kepentingan masing-masing dan saling terikat dalam suatu lembaga yang mengelola sistem kerjasama antara kedudukannya. Selain itu, kerjasama bilateral juga dapat diartikan sebagai kerjasama diplomatik yang dimulai dengan ikatan yang erat antara kedua pihak.

Menurut (Krisna, 1961) dalam buku politik internasional yang dimilikinya, dinyatakan bahwa hubungan bilateral yaitu hubungan timbal balik antara dua belah pihak atau negara yang saling mempengaruhi. Dalam hal ini, dua negara yang dimaksud adalah Indonesia dan Singapura, terutama dalam kerjasama pengembangan pariwisata Lagoi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura terus meningkat, Kedekatan dan produktivitas hubungan bilateral ini penting dan harus terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia (Sucita & Prasetya, 2021).

2.2.2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan tujuan atau cita-cita penting dari suatu negara yang bersifat vital dan harus dipertahankan secara berkelanjutan, baik dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan negara lain (Rijal, 2019). Dapat dinyatakan bahwa kepentingan nasional terdiri dari dua jenis, yaitu kepentingan praktis yang bersifat jangka pendek dan kepentingan kontinuitas yang lebih berfokus pada jangka panjang dan berkesinambungan (Matthew, 2020). Dalam konteks kepentingan nasional, kepentingan jangka pendek atau kepentingan praktis merujuk pada kebutuhan mendesak suatu negara yang terkait dengan eksistensinya dan bersifat temporer, sementara kepentingan jangka panjang atau kontinuitas merujuk pada kepentingan nasional yang didapatkan melalui hubungan yang berkelanjutan dengan negara lain (Matthew, 2020).

Secara umum, kepentingan nasional suatu negara meliputi kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan-pertahanan, dan perekonomian (Siagian et al., 2021). Ide dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara adalah konsep kepentingan

nasional. Kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan utama dan faktor penentu utama yang mengarahkan para pembuat keputusan negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Menurut pengantar realis, kepentingan nasional adalah usaha negara untuk mencapai kekuasaan, yang mencakup segala sesuatu yang dapat memperluas dan mempertahankan kendali suatu negara terhadap negara lain (Gultom, 2022).

Sebagai pelaku yang membuat keputusan dan memainkan peran penting dalam hubungan internasional, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat di wilayahnya (Raharjo, 2015). Kebutuhan masyarakat di wilayah suatu negara menciptakan keberadaan dari kepentingan suatu negara itu sendiri. Kepentingan lain yaitu ingin menjadi *power* sehingga menciptakan kekuatan atau pengakuan dari dunia internasional. Liberalism memandang bahwa kepentingan nasional tidak hanya terletak pada keamanan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan pasar. Kedua faktor ini harus diperhitungkan dalam merumuskan kebijakan (Hadiwinata, 2017).

Thomas Hobbes menarik kesimpulan “*That the state is regarded as the guardian of territory, population, and unique and valuable way of life*” (Khairani et al., 2019). Kehadiran negara sangat penting bagi kehidupan penduduknya karena negara bertanggung jawab dalam memberikan jaminan atas fasilitas, kondisi keamanan, dan kemajuan kesejahteraan, sehingga tanpa

keberadaan negara, kehidupan masyarakat akan terbatas (Rosana, 2016).

Menurut Morgenthau yang dikutip dari Scheuerman, 2009, *“that a country is considered as the protector of physical, political, and cultural identity from interference by other countries. Through this assessment, the leaders of the country can formulate specific policies towards other countries that are cooperative or conflictual”*.

Dalam hal ini, peneliti mengambil penelitian dari sudut pandang negara Indonesia, dimana Singapura menjadi penyumbang wisatawan tertinggi di Bintan, oleh karena itu kerjasama ini menjadi diutamakan guna meningkatkan ekonomi Indonesia melalui pendapatan dari sektor pariwisata. Singapura menjadi negara investasi terbesar bagi Indonesia, dengan menempati posisi teratas sebagai investor dalam bentuk modal usaha di Indonesia.

2.2.3. Teori Pariwisata

A. Pengertian Pariwisata

Dikatakan bahwa presiden Soekarno menjadi tokoh yang pertama kali menggunakan istilah “pariwisata” dalam sebuah percakapan sebagai bentuk dari kata asing “*tourism*”, menurutnya, pariwisata akan gagal jika tidak ada pengembangan fasilitas pendukung seperti hotel, transportasi, dan infrastruktur lainnya yang mendukung kegiatan pariwisata (Solemede et al., 2020). Menurut

(UU Republik Indonesia No.10 Tahun 2009) pariwisata merujuk pada berbagai kegiatan liburan yang diperkuat oleh sarana dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, serta pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Menurut Spillane yang dikutip dari (Mudrikah et al., 2014) *“tourism refers to the temporary travel activities from one location to another, carried out individually or in groups, with the aim of seeking balance, harmony, and happiness with the environment in its social, culture, natural, and knowledge dimensions”*.

Pendit mengemukakan pengertian pariwisata yang dikutip dari (Hapsari & Rahayu, 2018) sebagai sebuah proses pergi sementara dari satu atau beberapa orang ke tempat di luar tempat tinggal mereka, dengan keperluan yang mendorong perjalanan tersebut beragam. Menurut Salah Wabah yang dikutip dari (Wibowo et al., 2017), mendefinisikan pariwisata sebagai aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang melibatkan penerimaan layanan dari berbagai individu di dalam negeri atau luar negeri. Ini termasuk pendiaman sementara oleh orang-orang dari daerah lain yang mencari pengalaman yang berbeda dan beragam dari kehidupan keseharian mereka, sambil juga berpotensi mendapatkan peluang kerja jangka panjang.

Hunziker dan Kraff menjelaskan pengertian pariwisata yang dikutip dari (Dharma & Siregar, 2017) menjelaskan bahwa pariwisata merujuk pada sejumlah keterkaitan dan fenomena yang

muncul ketika orang asing tinggal di suatu tempat, dengan catatan mereka hanya berkunjung dan bukan menetap sampai memiliki rumah pribadi, bekerja dalam waktu tertentu, dan bahkan memiliki bisnis. Pariwisata sangat sulit dijelaskan secara tepat, sebab dalam pariwisata melibatkan banyak pihak seperti bisnis, pemerintah, penelitian, dan karena perubahan yang cepat dalam industri pariwisata (Drakel, 2022). Seorang atau sekelompok ke suatu tempat dengan mengeluarkan uang, dengan niat dan tujuan untuk berlibur dan bersenang-senang disebut pariwisata.

Susanto & Kiswanto, 2020 menjelaskan arti dari pariwisata sebagai perpindahan tempat tinggal sementara seseorang dari kampung halamannya karena alasan tertentu dan bukan untuk mencari upah, karena pada dasarnya pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan untuk memperoleh pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan rasa ingin tahu. Alasan lainnya orang berpariwisata dapat terkait dengan kepentingan dalam melakukan aktivitas olahraga untuk kesehatan, acara konvensi, aspek keagamaan, atau kebutuhan bisnis lainnya (A. Rahmi, 2019). Pada prinsipnya, pengembangan pariwisata merupakan suatu proses terus-menerus untuk menyesuaikan ketersediaan sumber daya pariwisata dengan penawaran dan permintaan dengan harapan menciptakan hasil yang diinginkan, sehingga dalam proses ini akan terjadi upaya penyesuaian dan keseimbangan antara aspek pemasok dan permintaan di sektor pariwisata (Kusuma & Arifien, 2020).

Elemen esensial yang mendukung perkembangan adalah kegiatan yang mencakup :

1. Atraksi

Industri pariwisata memiliki fokus utama pada atraksi. Atraksi dapat berasal dari kondisi alam, bangunan buatan manusia, atau acara-acara dan fenomena budaya.

2. Amenitas

Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk memberikan layanan dan menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi para pelancong. Fasilitas dan layanan yang harus tersedia ini mencakup fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akomodasi, restoran dan kafe, keamanan, serta berbagai hal lain yang terkait dengan kebutuhan wisatawan.

3. Aksesibilitas.

Meningkatnya aksesibilitas mengacu pada kemudahan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah tertentu. Di dalam industri pariwisata, perkembangan teknologi modern terutama pada bidang transportasi dan komunikasi sangatlah penting. Transportasi memainkan peran penting dalam membantu wisatawan menuju tempat tujuan mereka. Manum,

penggunaan transportasi ini tergantung pada jarak dan kebutuhan tempat atau lokasi yang ingin dikunjungi (Nasrullah et al., 2020).

4. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan pendukung untuk fungsi pelayanan terdiri dari berbagai kondisi, baik itu dalam bentuk sistem pengetahuan atau bangunan fisik yang terletak di atas atau di bawah permukaan tanah. Infrastruktur yang diperlukan mencakup ketersediaan air bersih, pembangunan layanan transportasi, listrik, jaringan komunikasi, dan pengelolaan limbah.

5. Akomodasi

Salah satu hal yang penting bagi para pelancong adalah akomodasi atau tempat untuk bermalam. Tempat menginap yaitu rumah bagi pelancong yang ingin mengunjungi objek wisata dengan menginap untuk sementara waktu. Akomodasi menjadi hal penting dalam menjaga eksistensi suatu wisata.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu anggapan terhadap solusi awal atas sebuah pernyataan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dengan mempergunakan data yang telah dikumpulkan (Zaki & Saiman, 2021). Maka hipotesis yang peneliti memiliki dalam penelitian ini, yaitu:

“Jika kerjasama pengembangan pariwisata Lagoi oleh investor Singapura, maka akan berpengaruh terhadap Kabupten Bintan”.

2.4. Kerangka Analisis

